

## Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial sebagai Upaya Pencegahan Konflik

Erna Nazila<sup>1</sup>, Linda Agustina<sup>2</sup>, Mimi Armianti<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondensi: [ernanazila8@gmail.com](mailto:ernanazila8@gmail.com)

### ABSTRACT

*Social conflict remains a common problem in various regions in Indonesia, arising from differences in interests, economic, social, cultural, or political conditions. If not prepared early, conflict has the potential to escalate into a broader problem and disrupt public security, order, and quality of life. Therefore, mapping conflict-prone areas is a crucial step in identifying areas with the potential for conflict, enabling more precise and effective prevention efforts. This study aims to analyze the importance of mapping areas prone to social conflict as a conflict prevention measure, as well as to identify various factors that trigger potential conflict within the community. This study uses a qualitative, descriptive approach using a literature study method, involving the collection and analysis of various scientific sources, regulations, and documents related to social conflict and strategies for preventing it. The results indicate that mapping conflict-prone areas can benefit the government, security forces, and the community in identifying high-risk areas, understanding the causes of conflict, and designing more targeted prevention measures through better coordination, early detection, intergroup dialogue, and community empowerment. This research shows that mapping areas prone to conflict should be part of a sustainable conflict management policy, to create stable social conditions, increase the sense of security for the community, and support more harmonious regional development.*

### ABSTRAK

Konflik sosial masih menjadi masalah yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, yang bisa timbul karena perbedaan dalam hal kepentingan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Jika tidak dipersiapkan secara dini, konflik berpotensi berubah menjadi permasalahan yang lebih luas dan dapat mengganggu keamanan, ketertiban, serta kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, melakukan pemetaan terhadap daerah rawan konflik merupakan langkah penting untuk mengenali wilayah yang berpotensi mengalami konflik, sehingga upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan lebih tepat dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa pentingnya pemetaan wilayah yang rawan terjadi konflik sosial sebagai langkah pencegahan konflik, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memicu munculnya potensi konflik dalam masyarakat. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber ilmiah, peraturan, serta dokumen terkait dengan konflik sosial dan strategi untuk mencegahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan wilayah rawan konflik dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat dalam mengidentifikasi daerah dengan risiko tinggi, memahami penyebab munculnya konflik, serta merancang langkah pencegahan yang lebih tepat sasaran dengan menerapkan koordinasi yang lebih baik, deteksi dini, dialog antar kelompok, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemetaan wilayah yang rentan terjadi konflik sebaiknya menjadi bagian

### KEYWORDS:

*Mapping of social conflicts, conflict-prone areas, conflict prevention, early detection, social stability.*

### KATA KUNCI:

*Pemetaan konflik sosial, daerah rawan konflik, pencegahan konflik, deteksi dini, stabilitas sosial.*

### How to Cite:

“Nazila, E., Agustina, L. ., & Armianti, M. . (2026). Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial sebagai Upaya Pencegahan Konflik. *GENRES : Journal of General Studies and Research*, 1(2), 259-269.”

dari kebijakan pengendalian konflik yang berkelanjutan, untuk menciptakan kondisi sosial yang stabil, meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih harmonis.

---

## PENDAHULUAN

Konflik sosial tetap menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Keragaman dalam hal suku, agama, budaya, bahasa, kondisi ekonomi, serta perbedaan kepentingan politik merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa, namun jika tidak dikelola secara baik, hal tersebut juga dapat menjadi penyebab munculnya konflik. Konflik sosial tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mengganggu hubungan sosial, mengurangi rasa aman masyarakat, menghambat pertumbuhan daerah, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan secara terencana dan teratur sebelum konflik semakin memburuk. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memetakan daerah yang berpotensi mengalami konflik sosial, sehingga dapat menjadi dasar dalam merancang strategi pencegahan yang tepat dan efektif.

Pemetaan area berpotensi konflik adalah proses menentukan wilayah yang rentan terhadap terjadinya konflik dengan mempertimbangkan berbagai indikator, seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, serta aspek keamanan. Informasi yang diperoleh dari proses pemetaan tersebut dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam mengidentifikasi potensi masalah sejak dini, merancang kebijakan, serta mengambil tindakan pencegahan yang sesuai dengan ciri khas wilayah masing-masing. Dengan adanya pemetaan yang tepat, potensi konflik dapat terdeteksi lebih dini sehingga upaya penyelesaian dapat dilakukan melalui perundingan, mediasi, atau pemberdayaan masyarakat, tanpa harus menunggu konflik berkembang menjadi tindakan kekerasan.

Secara teoritis, penelitian ini melandaskan diri pada teori konflik yang diajukan oleh Lewis A. Coser yang menjelaskan bahwa konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial. Konflik sering terjadi karena adanya perbedaan ketertarikan, nilai, atau pembagian sumber daya yang ada di masyarakat. Namun, jika dikelola secara tepat, konflik juga bisa menjadi sarana untuk memperkuat hubungan sosial serta mendorong perubahan yang lebih positif. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan konsep pencegahan konflik yang memperkuat pentingnya upaya pendeteksian dini terhadap berbagai faktor yang dapat memicu konflik, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum konflik berkembang menjadi lebih luas. Pendekatan ini menganggap pemetaan daerah berpotensi konflik sebagai salah satu alat penting dalam memperkuat sistem peringatan dini serta meningkatkan kemampuan siap siaga berbagai pihak.

Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, pentingnya pencegahan konflik juga ditekankan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat serta pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya konflik melalui berbagai upaya, di antaranya mempertahankan kondisi yang damai, mengembangkan sistem penyelesaian sengketa secara adil dan damai, mengurangi potensi munculnya konflik, serta membangun sistem pengawasan dini terhadap indikator-indikator konflik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemetaan

daerah rawan konflik bukan hanya menjadi kebutuhan dalam bidang akademik, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional untuk menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa proses pemetaan konflik memiliki peran penting dalam membantu mencegah terjadinya konflik. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo pada tahun 2022 menunjukkan bahwa mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan prioritas kebijakan untuk menangani konflik secara lebih efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Arifin pada tahun 2023 juga menunjukkan bahwa penggunaan data sosial, ekonomi, serta demografi dapat memperbaiki akurasi dalam menganalisis potensi terjadinya konflik di suatu daerah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dkk.(2024) menunjukkan bahwa melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, serta aparat keamanan dalam proses pemetaan dapat memperkuat mekanisme deteksi dini, sehingga potensi konflik dapat dikurangi sejak tahap awal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemetaan wilayah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung upaya pencegahan konflik, meskipun pendekatan yang digunakan masih bervariasi tergantung pada karakteristik masing-masing daerah penelitian.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada penyelesaian konflik setelah konflik terjadi atau pada analisis faktor-faktor yang menyebabkan konflik di suatu wilayah. Penelitian yang secara khusus membahas pemetaan daerah rawan konflik sebagai strategi pencegahan yang mengintegrasikan identifikasi faktor-faktor yang memicu kerawanan, deteksi dini, serta penyusunan langkah-langkah pencegahan masih terbatas. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi pemetaan konflik sebagai bagian dari sistem pencegahan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi perubahan dinamika sosial yang terus berkembang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya, yang menjadi dasar penting untuk dilakukannya penelitian ini.

Inovasi penelitian ini terdapat pada pembahasan yang memandang pemetaan daerah rawan konflik bukan hanya sebagai tahap mengidentifikasi wilayah yang berpotensi konflik, tetapi juga sebagai alat strategis dalam membangun sistem pencegahan konflik yang bersifat preventif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggabungkan analisis terhadap berbagai faktor yang menyebabkan konflik, pentingnya melakukan deteksi dini, kerja sama antar pihak yang terlibat, serta pemberdayaan masyarakat sebagai satu bagian yang utuh dalam rangka mencegah terjadinya konflik sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pemetaan daerah yang berpotensi mengalami konflik sosial sebagai langkah pencegahan konflik, mengidentifikasi berbagai faktor penyebab tingkat kerawanan konflik di masyarakat, serta menjelaskan cara hasil pemetaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi pencegahan konflik yang lebih efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan studi tentang manajemen konflik sosial dan menjadi referensi bagi pemerintah, instansi keamanan, serta masyarakat dalam merancang kebijakan

pencegahan konflik yang lebih tepat sasaran, sehingga dapat mewujudkan kestabilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dengan jenis desain penelitian yang deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai pembuatan peta daerah rawan konflik sosial sebagai salah satu upaya dalam mencegah terjadinya konflik. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan penjelasan yang dalam mengenai fenomena konflik sosial dengan menganalisis berbagai informasi terkait penyebab konflik, ciri-ciri wilayah yang rentan terhadap konflik, serta strategi pencegahan yang dapat dilaksanakan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan lebih menekankan pada pemahaman terhadap konsep, teori, serta hasil penelitian yang telah ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pentingnya pemetaan daerah rawan konflik.

Penelitian ini mengadopsi metode studi kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utama dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, seperti artikel jurnal nasional dan internasional, buku, hasil penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, laporan dari lembaga terkait, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas sumber, serta keterbaruan publikasi sempungan adalah mendukung analisis penelitian secara objektif.

Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, maka tidak ada populasi atau sampel dalam bentuk responden yang dientrevue dalam penelitian tersebut. Sebagai pengganti itu, unit analisis penelitian berupa berbagai dokumen ilmiah dan kebijakan yang membahas mengenai konflik sosial, pemetaan daerah yang rawan konflik, sistem deteksi dini, serta upaya pencegahan konflik di Indonesia. Pemilihan dokumen dilakukan dengan cara purposive, yaitu memilih sumber yang sangat relevan dengan topik penelitian yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian, termasuk jurnal ilmiah, buku elektronik, peraturan pemerintah, serta publikasi resmi dari lembaga terkait. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya disaring, dikelompokkan berdasarkan topik pembahasan, dan disusun secara teratur agar memudahkan proses analisis. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (instrumen manusia), yang bertugas mengidentifikasi, memilih, menginterpretasikan, serta menyimpulkan berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai sumber referensi.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengacu pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Model ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap mengurangi data, peneliti memilih

informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk penjelasan naratif yang terstruktur secara sistematis sehingga memudahkan pemahaman mengenai hubungan antar konsep. Tahap terakhir dilakukan dengan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penganalisisan terhadap berbagai temuan yang diperoleh dari literatur.

Untuk meningkatkan kebenaran data, penelitian menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi pemerintah. Selain itu, para peneliti juga melakukan evaluasi kritis terhadap setiap sumber yang digunakan dengan memperhatikan kredibilitas penulis, lembaga penerbit, serta sejauh mana isi sumber tersebut relevan dengan fokus penelitian. Dengan menerapkan prosedur tersebut, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta dokumen resmi yang terkait dengan isu konflik sosial dan pemetaan daerah yang rawan konflik. Proses pengumpulan data dilakukan dari bulan Juni hingga Juli tahun 2026. Data tersebut diperoleh dengan melakukan pencarian di berbagai sumber data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, SINTA, Neliti, serta situs jurnal yang dimiliki oleh institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Karena penelitian ini berupa penelitian kepustakaan, maka penelitian tidak dilaksanakan di lokasi tertentu, melainkan menggunakan berbagai sumber ilmiah yang membahas situasi konflik sosial di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Lampung, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Proses analisis dimulai dengan mengenali berbagai sumber literatur yang berkaitan, lalu dilakukan pemilihan berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan pengelompokan data berdasarkan faktor-faktor penyebab konflik, ciri-ciri kawasan yang rentan terhadap konflik, jenis pemetaan konflik, serta strategi pengendalian konflik yang telah diterapkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Setelah semua data terkumpul, dilakukan analisis kualitatif deskriptif sehingga diperoleh gambaran mengenai pentingnya pemetaan daerah rawan konflik sebagai bagian dari sistem pencegahan konflik sosial.

Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menyatakan bahwa konflik sosial di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain. Faktor tersebut tidak hanya berasal dari perbedaan suku, agama, ras, atau budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi, persaingan dalam memperoleh sumber daya, kepentingan politik yang bertentangan, rendahnya komunikasi antar kelompok, penyebaran informasi yang tidak akurat, serta rendahnya kepercayaan masyarakat

terhadap penyelenggara pemerintahan. Kondisi tersebut membuat setiap daerah memiliki tingkat risiko konflik yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan pencegahan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai penelitian yang relevan, melakukan pemetaan terhadap daerah yang berpotensi mengalami konflik merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam upaya mencegah terjadinya konflik sosial. Melalui pemetaan tersebut, pemerintah dapat memahami lokasi yang berpotensi mengalami konflik, kelompok masyarakat yang cenderung rentan terhadap perselisihan, penyebab utama terjadinya konflik, serta dampak yang mungkin terjadi jika konflik tidak segera diatasi. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan pencegahan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi di setiap daerah.

Tabel 1. Faktor-faktor penyebab daerah rawan konflik sosial

| No. | Faktor Penyebab                       | Dampak terhadap Masyarakat                  |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.  | Perbedaan suku, agama, ras dan budaya | Perbedaan suku, agama, ras dan budaya       |
| 2.  | Ketimpangan ekonomi                   | Menimbulkan kecemburuan sosial              |
| 3.  | Persaingan politik                    | Memicu polarisasi masyarakat                |
| 4.  | Sengketa lahan dan sumber daya alam   | Menimbulkan konflik antar kelompok          |
| 5.  | Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian | Mempercepat eskalasi konflik                |
| 6.  | Kurangnya komunikasi                  | Memperbesar kesalahpahaman antar masyarakat |
| 7.  | Lemahnya deteksi dini                 | Konflik terlambat diantisipasi              |

Tabel 1 menunjukkan bahwa konflik sosial tidak muncul hanya karena satu faktor tertentu, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan kelembagaan. Oleh karena itu, pemetaan konflik perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua indikator yang relevan agar hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas penanganan konflik.

Selain mengidentifikasi penyebab konflik, penelitian ini juga menemukan bahwa daerah yang sudah menerapkan sistem deteksi dini dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengurangi risiko konflik dibandingkan daerah yang belum memiliki sistem serupa. Sistem deteksi dini memungkinkan pengumpulan berbagai informasi mengenai kemungkinan terjadinya konflik secara lebih cepat, sehingga pemerintah dapat segera melakukan tindakan pencegahan dengan cara mediasi, dialog, atau penyelesaian melalui musyawarah.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan pemetaan daerah yang rentan terhadap konflik. Masyarakat adalah pihak yang paling mengerti kondisi sosial di daerahnya, sehingga informasi yang mereka berikan dapat membantu meningkatkan keakuratan dalam pemetaan. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi

kemasyarakatan, dan pemerintah desa juga berperan dalam memperkuat proses mengidentifikasi potensi konflik serta mempercepat penyelesaian masalah sebelum kasus tersebut berkembang menjadi konflik terbuka.

## **Pembahasan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa membuat peta wilayah yang berpotensi mengalami konflik merupakan salah satu cara yang berhasil dalam membantu mencegah terjadinya konflik sosial. Pemetaan tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi lokasi dengan tingkat kerawanan yang tinggi, tetapi juga menyajikan informasi tentang penyebab konflik, kelompok yang mungkin terlibat, serta jenis konflik yang bisa terjadi. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan pencegahan yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya pemetaan, langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum konflik berkembang menjadi konflik yang terbuka dan mengakibatkan kerugian dalam aspek sosial maupun ekonomi. Hasil ini sesuai dengan penelitian tentang pemetaan konflik di Provinsi Lampung yang menunjukkan bahwa identifikasi daerah rawan konflik membantu pemerintah memahami ciri-ciri konflik serta menentukan strategi penyelesaian yang tepat.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa konflik sosial umumnya tidak terjadi karena satu penyebab saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain. Perbedaan antar suku, agama, budaya, kepentingan politik, ketimpangan ekonomi, sengketa lahan, ketidakmerataan distribusi sumber daya, serta penyebaran informasi yang tidak akurat menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko terjadinya konflik. Oleh karena itu, proses pemetaan tidak hanya berhenti pada pengidentifikasian lokasi konflik, tetapi juga harus mengidentifikasi akar masalah yang muncul di masyarakat, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat mengarah pada penyebab utama konflik tersebut.

Ditinjau dari perspektif teori konflik Lewis A. Konflik adalah bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan atau nilai. Konflik tidak selalu memiliki dampak yang buruk jika dikelola secara tepat, karena bisa menjadi sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan mendorong adanya perubahan kebijakan yang lebih adil. Dalam rangka penelitian ini, pemetaan area yang berisiko terjadi konflik berfungsi sebagai alat penting dalam memahami perubahan sosial sebelum konflik berkembang menjadi bentuk kekerasan. Dengan demikian, pemerintah dapat menggunakan pendekatan persuasif berupa dialog, mediasi, dan musyawarah agar konflik dapat diatasi dengan damai.

Selain berdasarkan teori konflik, hasil penelitian ini juga memperkuat gagasan tentang pencegahan konflik, yang menekankan pentingnya melakukan tindakan sejak dini untuk mencegah terjadinya konflik, dibandingkan hanya menyelesaikan konflik setelah terjadi. Pencegahan konflik dilakukan dengan mengidentifikasi risiko yang ada, menganalisis tingkat kerawanan, membangun sistem peringatan dini, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena dapat mengurangi pengaruh sosial dan ekonomi yang timbul akibat konflik. Penelitian tentang sistem deteksi dini di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa penerapan Conflict Early Warning and Early Response System

(CEWERS) berhasil meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik sejak tahap awal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kerja sama antar instansi memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dalam pemetaan wilayah yang rawan konflik. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja secara mandiri, melainkan memerlukan bantuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, akademisi, serta masyarakat sebagai sumber informasi utama. Kolaborasi tersebut memungkinkan proses mengidentifikasi potensi konflik menjadi lebih tepat karena masing-masing pihak memiliki informasi yang berbeda sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan bahwa kinerja instansi Kesbangpol merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas upaya pencegahan konflik, terutama melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi yang baik, serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara tepat dan jelas.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan dalam pemetaan konflik sosial. Masyarakat adalah pihak yang paling mengerti tentang kondisi sosial di sekitar lingkungannya, sehingga dapat memberikan informasi mengenai tanda-tanda awal konflik yang mungkin tidak terlihat atau terdeteksi oleh pemerintah. Partisipasi aktif dari tokoh agama, tokoh adat, pemuda, serta organisasi masyarakat dapat memperkuat mekanisme deteksi dini dan meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Penelitian tentang tokoh perdamaian di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pemetaan konflik serta pelaksanaan sosialisasi dapat meningkatkan kemampuan dalam mencegah terjadinya konflik sosial.

Perkembangan di bidang teknologi informasi membuka kesempatan baru dalam proses pemetaan konflik. Saat ini, proses pemetaan tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan mulai menggunakan sistem informasi berbasis digital yang memungkinkan data konflik diperbarui secara berkala dan diakses dengan lebih cepat oleh instansi terkait. Pemanfaatan Sistem Informasi Peta Konflik (SIPELIK) di Provinsi Bali menunjukkan bahwa proses digitalisasi pemetaan mampu meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data, analisis terhadap area yang rentan konflik, serta peningkatan kecepatan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.

Selain bidang teknologi informasi, kemajuan teknologi geospasial juga memperkuat proses pemetaan konflik dengan lebih tepat dan akurat. Penggunaan gambar dari udara serta teknologi pemetaan terkini memungkinkan pihak yang memerlukan untuk mengenali area konflik tanpa perlu menghadapi ancaman keamanan secara langsung. Teknologi tersebut lebih tepat digunakan dalam situasi konflik pertanahan atau area dengan risiko yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dalam proses pengumpulan data.

Hasil penelitian ini sesuai dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa pemetaan konflik merupakan bagian penting dalam sistem pencegahan konflik sosial. Namun demikian, penelitian ini berbeda karena tidak hanya meninjau proses pengidentifikasian wilayah rentan konflik, tetapi juga menggabungkan berbagai faktor penyebab konflik, mekanisme deteksi dini, kerja sama antar pihak terkait,

pemanfaatan teknologi digital, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan konflik yang berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mendorong perkembangan studi mengenai manajemen konflik sosial, terutama dalam menjelaskan pentingnya pemetaan wilayah yang rentan terhadap konflik sebagai bagian dari mekanisme peringatan dini. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa konflik sosial dapat diatasi secara lebih efektif jika pemerintah mampu mengenali dan menganalisis potensi risiko secara terstruktur sebelum konflik berkembang semakin parah.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mempertimbangkan penyusunan kebijakan pencegahan konflik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, instansi keamanan, serta organisasi masyarakat. Penyusunan database daerah rawan konflik, peningkatan kerja sama antar sektor, penguatan mekanisme pengawasan dini, pemanfaatan informasi teknologi, dan peningkatan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat menciptakan situasi sosial yang aman, harmonis, serta kondusif, sehingga proses pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemetaan daerah rawan konflik sosial sebagai langkah pencegahan konflik, dapat disimpulkan bahwa pemetaan konflik memainkan peran penting dalam mengenali potensi konflik secara dini serta menjadi dasar untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih tepat. Penelitian ini menyatakan bahwa daerah yang rentan terhadap konflik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adanya perbedaan kepentingan, ketimpangan dalam aspek sosial dan ekonomi, perselisihan identitas, perebutan sumber daya, serta rendahnya tingkat komunikasi antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, peta wilayah konflik tidak hanya menampilkan tempat terjadinya konflik, tetapi juga harus memperhatikan penyebab konflik serta kondisi sosial yang berada di baliknya.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan pemetaan daerah yang rentan terhadap konflik dapat memperkuat upaya pencegahan dengan meningkatkan sistem deteksi dini, memperbaiki kerja sama antar pihak yang berkepentingan, serta melibatkan masyarakat dalam mengenali dan menyelesaikan berbagai isu sosial yang mungkin terjadi. Dengan demikian, pemetaan konflik dapat berfungsi sebagai alat pencegahan yang membantu pemerintah serta masyarakat dalam mengambil langkah-langkah tepat sebelum konflik berkembang lebih parah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi kepustakaan, sehingga belum dapat menggambarkan secara langsung kondisi di lapangan pada wilayah tertentu. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan pendekatan empiris dengan cara melakukan observasi di lapangan, wawancara, atau memanfaatkan data spasial sehingga dapat menghasilkan pemetaan konflik yang lebih spesifik dan sesuai dengan ciri khas masing-masing wilayah. Selain itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait pemanfaatan teknologi digital dalam sistem peringatan dini konflik sosial agar dapat meningkatkan efektivitas pencegahan konflik di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anadirga, C. N., Nurdin, N., & Sinurat, M. (2024). Efektivitas penanganan konflik sosial oleh tim terpadu di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Pemerintahan: Journal of Government, Social and Politics*, 10(2), 39–48.
- Djarmiko, A. A., & Purnamasari, N. L. (2025). Indikator potensi konflik sosial menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2024. *Jurnal Civic Hukum*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.22219/jch.v10i1.36072>
- Fakhrul, R., & Khairulyadi. (2022). Deteksi dini dalam penyelesaian konflik sosial oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala*, 7(2), 1–15.
- Gaghuaube, V. G. (2022). Pemulihan pascakonflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. *Lex Crimen*, 11(2), 1–10.
- Hidayat, R., Prasetyo, B., & Kurniawan, A. (2024). Sistem deteksi dini konflik sosial dalam penguatan keamanan masyarakat. *Jurnal Keamanan Nasional*, 10(1), 55–70.
- Jati, R. (2025). Pemetaan konflik sosial pasca pembakaran kertas suara pada Pemilu 2024 di Kecamatan Parado Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 13(1), 1–12.
- Malik, I. (2017). *Strategi pencegahan konflik: Kerangka dinamis pencegahan konflik*. Jakarta: The Habibie Center.
- Miall, H., Ramsbotham, O., & Woodhouse, T. (2002). *Resolusi damai konflik kontemporer: Menyelesaikan, mencegah, dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama, dan ras*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Naibin, N., Maftukhin, M., Moebin, A. A., & Fahrudin, A. (2023). Pendampingan masyarakat sebagai deteksi dini konflik sosial dalam penguatan moderasi beragama di Kabupaten Tulungagung. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 12–19.
- Nugroho, N. D. (2023). E-government dalam mitigasi potensi konflik sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 12(1), 73–81.
- Novitasari, S. A., Lubis, A. F., & Bunyamin, I. A. (2026). Pencegahan dan penanganan konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 5(1), 1–12.
- Setiawan, W., & Amar. (2021). Spatial perception towards social conflicts and the built environment in Indonesia. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 9(2), 134–150.
- Silvana, L. (2013). Pemetaan daerah rawan konflik di Provinsi Lampung. *Jurnal Bina Praja*, 5(3), 169–176. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.169-176>
- Supardi, Y. I. P., Syahtaria, M. I., Azhari, Y., Setyawibawa, R., & Uksan, A. (2025). Peran Kementerian Dalam Negeri sebagai tim terpadu dalam upaya penanganan konflik sosial di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 2332–2343.

- Sintaresmi, P., Muchsin, S., & Ahmadi, R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 43–55.
- Wibowo, A. (2022). Pemetaan wilayah rawan konflik sosial sebagai strategi pencegahan konflik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), 115–126.
- Rahmawati, D., & Arifin, Z. (2023). Analisis faktor penyebab konflik sosial dan strategi pencegahannya dalam masyarakat multikultural. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(2), 201–216.